



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025

RENJA TAHUN 2026

KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun Lalu	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	22
2.3 Prestasi yang dicapai pada Tahun 2023	25
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	26
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah	37
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi ...	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Brangsong	39
3.3 Program dan Kegiatan	40
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	43
BAB V Penutup	45

Lampiran.

1. SK Bupati Kendal Nomor 100.3.3.2/7/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2025	23
Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
Tabel 2.3 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	37
Tabel 2.4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026	40
Tabel 3.1 : Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2026	44
Tabel 3.2 : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Brangsong Tahun 2026	47
Tabel 3.3 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	49
Tabel 4.1 : Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 Kecamatan Brangsong mengacu pada konsep Renstra Kecamatan Brangsong tahun 2021-2026. Penyusunan Renja 2026 sudah memperhatikan prioritas RPJMD tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Renja tahun 2026 juga memperhatikan RPJPD (2025-2045), prioritas Nasional tahun 2026 dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah tahun 2026.

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang akan ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026 yaitu guna mendukung pencapaian visi-misi Bupati Kendal yaitu “ Visi pembangunan jangka menengah daerah adalah untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah yaitu **“Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan ”**.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah *“Sustainable Kendal”*, dengan prioritas pada “Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan”. Prioritas tahun 2026 adalah peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya rasa aman yang dapat menjadikan masyarakat untuk bebas beraktivitas, serta terwujudnya toleransi antar umat beragama dan kesetaraan gender, serta memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 dan tahun berjalan 2025, serta memuat program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2026. Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang memuat daftar rencana program kegiatan Tahun 2024, maka proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ini juga dilakukan secara top down dan bottom up, yaitu memadukan antara hasil kajian prioritas kebutuhan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah atasan dan dokumen Renstra Kecamatan Brangsong serta RPJMD Kabupaten Kendal yang telah ditetapkan.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan, dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, Renja merupakan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang– Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845).
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Kendal Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu Tahun anggaran sebagai penjabaran

Rencana Strategis Kecamatan Brangsong 2021-2026 dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana program dan kegiatan prioritas Tahun 2026.

Adapun Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Brangsong ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Pemerintah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam menentukan prioritas program dan kegiatan (Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) Tahun 2026;
2. Menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Kecamatan Brangsong dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Brangsong Tahun 2026;
3. Menyediakan satu acuan bagi Pemerintah Kecamatan Brangsong dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Tahun Anggaran 2026;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Brangsong dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026;
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pemerinah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penyusunan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, analisis kinerja pelayanan Kabupaten Kendal, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal pada Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Brangsong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Brangsong menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Brangsong selama Tahun 2024 dan tahun berjalan 2025 serta perkiraan target anggaran Tahun 2026. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Tahun 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Brangsong Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja

pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan antara lain:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 2.036.034.971,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.957.048.888,-
Realisasi Anggaran (%) : 96,12%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah orang yang menerima
keluaran Gaji dan Tunjangan ASN
3. Target capaian kegiatan : 14 orang/bulan
4. Realisasi capaian kegiatan : 14 orang/bulan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Gaji dan tunjangan ASN dengan capaian kinerja 100 % , namun realisasi anggaran 95,18 % disebabkan karena adanya ASN yang pensiun, kekosongan pejabat struktural dan mutasi ASN

2) Administrasi Umum, dengan sub kegiatan antara lain:

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 5.941.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 5.730.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 96,44%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Komponen
keluaran Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 1 paket
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 paket
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Kebutuhan alat listrik selama satu tahun sudah sesuai dengan yang dianggarkan, hal tersebut didukung dengan efisiensi penggunaan lampu dan komponen listrik lainnya.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 30.928.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 29.013.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 93,80%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Peralatan dan
keluaran Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 paket
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 paket
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Penyediaan kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas di kecamatan sudah dipenuhi.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 26.039.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 23.334.900,-
Realisasi Anggaran (%) : 89,61%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Peralatan
keluaran Rumah Tangga yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 paket
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 paket
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Penyediaan kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga untuk menunjang pelaksanaan tugas di kecamatan sudah dipenuhi.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 8.784.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 6.938.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 78,98%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Bahan Logistik
keluaran Kantor yang Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 paket
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 paket
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Penyediaan kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas di kecamatan sudah dipenuhi.

- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 15.272.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 11.552.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 75,64%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Paket Barang
keluaran Cetak dan Penggandaan
yang Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 paket
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 paket
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Paket barang cetak dan penggandaan stop map dan fotocopi sudah terpenuhi dengan realisasi anggaran 100%.

- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 187.212.999,-
Realisasi Anggaran : Rp. 160.207.426,-
Realisasi Anggaran (%) : 85,57%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan
keluaran Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

3. Target capaian kegiatan : 12 laporan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 laporan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

SPPD dalam daerah dan BBM tidak terserap 100 % karena bersifat penyediaan.

3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan:

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 37.100.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 33.100.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 89,21%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Unit Sarana dan
keluaran Prasarana Gedung Kantor
yang Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 5 Unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 5 Unit
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pengadaan yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sudah dipenuhi .

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan antara lain:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 4.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 4.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Penyediaan
keluaran Jasa Surat Menyurat
3. Target capaian kegiatan : 12 laporan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 laporan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Kebutuhan materai untuk pembuatan SPJ selama satu tahun sudah dipenuhi .

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 71.225.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 68.328.302,-
Realisasi Anggaran (%) : 95,93%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Penyediaan
keluaran Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 laporan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 laporan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pembayaran rekening listrik , telepon dan wifi sesuai dengan tagihan rekening untuk kebutuhan dalam satu tahun.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 161.400.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 159.286.896,-
Realisasi Anggaran (%) : 98,69%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Penyediaan
keluaran Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 12 laporan
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 laporan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pembayaran honor bagi tenaga TPK sudah dilaksanakan 12 bulan sebanyak 5 orang.

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 19.600.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 15.424.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 78,69%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Kendaraan Dinas
keluaran Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
3. Target capaian kegiatan : 14 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 14 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pembayaran pajak kendaraan dinas sebanyak 14 unit sudah dilaksanakan sesuai waktu perpanjangan masing-masing kendaraan dinas dan sudah dilakukan pemeliharaan kendaraan dinas sesuai kebutuhan.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 10.710.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 6.490.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 60,59%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Peralatan dan Mesin
keluaran Lainnya yang Dipelihara
3. Target capaian kegiatan : 14 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 14 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pemeliharaan komputer dan printer selama 1 tahun telah dilaksanakan termasuk penggantian keyboard laptop dan komputer, serta servis printer, scanner.

c. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 24.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 23.657.470,-
Realisasi Anggaran (%) : 98,57%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Gedung Kantor dan
keluaran Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
3. Target capaian kegiatan : 1 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pemeliharaan kantor dinas untuk perbaikan kamar mandi

d. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 19.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 18.704.595,-
Realisasi Anggaran (%) : 98,44%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Unit Sarana dan
keluaran Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan
3. Target capaian kegiatan : 18 unit
4. Realisasi capaian kegiatan : 18 unit
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Servise AC harus dilakukan secara berkala setiap tahunnya, ada juga yang perlu diperbaiki.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 (dua) kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, terdapat 1 (satu) sub kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerinahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.200.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.200.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen Non
keluaran Perizinan Usaha yang
Dilaksanakan
3. Target capaian kegiatan : 1 dokumen
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 dokumen
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Sosialisasi pengajuan ijin usaha telah dilaksanakan dengan mengundang dari unsur desa dan UMKM.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan:

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :

- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan indikator kinerja adalah :

1. Pagu Anggaran : Rp. 7.650.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 7.650.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Lembaga
keluaran Kemasyarakatan yang
Berpartisipasi dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
3. Target capaian kegiatan : 12 lembaga
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 lembaga
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Musrenbangcam sudah dilaksanakan dengan mengundang semua unsur dalam Musrenbangcam sebanyak 110 orang, dan peserta yang dihadiri sebanyak 110 orang.

b) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dengan indikator kinerja adalah :

1. Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 6.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 80%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Sinkronisasi Program
keluaran Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
yang Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di
Wilayah Kerja Kecamatan
3. Target capaian kegiatan : 1 dokumen
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 dokumen
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Kegiatan Lomba MTQ tingkat Kecamatan sudah dilaksanakan sesuai jadwal.

c) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan indikator kinerja adalah :

1. Pagu Anggaran : Rp. 53.461.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 46.621,000,-
Realisasi Anggaran (%) : 87,20%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah laporan Peningkatan
keluaran Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
di Wilayah Kecamatan
3. Target capaian kegiatan : 1 dokumen
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 dokumen
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Kegiatan Pleno dan Raker PKK sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan program kerja yang telah disusun oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Brangsong.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan:

a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan indikator kegiatan:

1. Pagu Anggaran : Rp. 10.150.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 9.500.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 93,59%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Sinergitas
keluaran dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
3. Target capaian kegiatan : 1 laporan
4. Realisasi capaian kegiatan : 1 laporan
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Terlaksananya kegiatan koordinasi kondusifitas wilayah Kecamatan

2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan :

a) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan indikator kinerja adalah :

1. Pagu Anggaran : Rp. 95.400.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 95.191.272,-
Realisasi Anggaran (%) : 99,78%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Laporan Koordinasi/
keluaran Sinergi dengan Perangkat

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 3. Target capaian kegiatan : 12 laporan
- 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 laporan
- 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Honor Linmas sebanyak 3 orang selama 12 bulan sudah dibayarkan sesuai Standar Biaya Umum Kabupaten Kendal.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan :

- a) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, dengan indikator kinerja antara lain :

- 1. Pagu Anggaran : Rp. 15.225.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 15.125.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 99,34%
- 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah orang yang mengikuti keluaran Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 3. Target capaian kegiatan : 50 orang
- 4. Realisasi capaian kegiatan : 50 orang
- 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Terlaksananya pembentukan Paskibra Kecamatan Brangsong.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan :

- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan antara lain:

a) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 1.200.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 600.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 50%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen yang keluaran Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Target capaian kegiatan : 12 lembaga
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 lembaga
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Pendampingan Penyusunan Perdes dan Perkades sudah dilaksanakan dan 12 desa sudah menyusun Perdes dan Perkades.

b) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 2.700.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.200.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 44,44%
2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen yang keluaran Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Target capaian kegiatan : 12 lembaga
4. Realisasi capaian kegiatan : 12 lembaga
5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%

Monev administrasi umum, administrasi pembangunan untuk 12 Desa di Kecamatan Brangsong

c) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan indikator kinerja antara lain:

1. Pagu Anggaran : Rp. 27.750.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 25.400.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 91,53%
 2. Indikator kinerja capaian : Jumlah Dokumen yang
keluaran Difasilitasi dalam rangka
Pengelolaan Keuangan Desa
dan Pendayagunaan Aset
Desa
 3. Target capaian kegiatan : 12 dokumen
 4. Realisasi capaian kegiatan : 12 dokumen
 5. Tingkat capaian kinerja (%). : 100%
- Monev administrasi umum, administrasi pembangunan, administrasi keuangan , pertanggung jawaban keuangan desa sudah dilaksanakan di 12 desa.

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Brangsong Tahun 2024, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.879.492.970,- (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), terserap anggaran sebesar Rp. 2.731.302.749,- (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 148.190.221,- (Seratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) merupakan efisiensi dan bersifat penyediaan. Keseluruhan anggaran yang terserap telah dipergunakan untuk mendanai keseluruhan program kegiatan Kecamatan Brangsong Tahun 2024 dan telah dipertanggung jawabkan penggunaannya.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)
Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Ralisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300	75%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	15 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	100%	13 Orang/bulan	42 Orang/bulan	32,84%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	1 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	25 paket	41,67%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	60%

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 paket	6 paket	6 paket	100%	12 paket	30 paket	50%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	60%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 paket	60%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 dokumen	36 laporan	60%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	4 Unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	14 Unit	280%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	16 Unit	14 unit	14 unit	100%	14 unit	44 unit	52,38%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	14 unit	14 unit	14 unit	100%	18 unit	46 Unit	65,71%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit	100%	1 unit	4 Unit	80%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	100%	18 unit	54 unit	60%
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	89	166	85	88	100%	87	341	66,34%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	50%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	59	56	58	15	38%	59	173	29,32%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 lembaga	12 lembaga	12 lembaga	12 lembaga	100%	12 lembaga	36 lembaga	60%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	66,67%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	2 laporan	6 laporan	75%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	85	152	81	79	95%	83	314	64,34%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	0 laporan	1 Laporan	1 Lapran	100%	1 laporan	2 laporan	200%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	60%
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani	83	149	79	77	97%	80	306	63,88%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%	55 orang	155 orang	62%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	200	100	100	100%	100	400	80%

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	36 dokumen	60%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	15 dokumen	83,3%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	15 dokumen	83,3%

Dari data sebagaimana tabel diatas, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2025 Kecamatan Brangsong adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi hasil pelaksanaan Renja 2024 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang dilaksanakan 1 (satu) urusan, 6 (enam) Program dan Indikator Kinerja Program, 11 (sebelas) kegiatan dan Indikator kinerja kegiatannya
 - b) Dari 6 (enam) indikator kinerja program, terdapat 1 (satu) indikator kinerja program yang tidak memenuhi target, yaitu Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD. Dari target usulan aspirasi masyarakat yaitu 58 (lima puluh enam) hanya 15 (lima belas) yang dapat diakomodir
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024. Dari 6 (enam) indikator kinerja program dan 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan, masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra

2.2 Capaian Kinerja Pelayanan PD

Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Didalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

- dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana tersebut diatas, Camat selaku Pimpinan Kecamatan juga melaksanakan pendelegasian kewenangan yang diberikan Bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kendal kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah. Sebagian kewenangan yang dilimpahkan tersebut meliputi 20 bidang yaitu : pengembangan otonomi daerah; perimbangan keuangan daerah; perekonomian; pertamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan; permukiman; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan; sosial dan kesejahteraan rakyat; pertanahan; pertanian tanaman pangan; perkebunan dan kehutanan; peternakan; perikanan dan kelautan; pertambangan umum; pekerjaan umum; pengairan; penataan ruang; perindustrian dan perdagangan; lingkungan hidup serta bidang pemuda dan olah raga.

Kecamatan Brangsong sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 mempunyai tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, namun pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Brangsong sebatas pada pemberian legalisasi Camat yang kemudian ditangani oleh Instansi lain, pelayanan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, SKCK oleh Polsek dan Polres, sebagian perijinan yang berskala kecil yaitu Ijin Mendirikan Bangunan dengan luasan bangunan kurang dari 100 m², sedangkan perijinan yang berskala besar dilaksanakan oleh DPMPT-SP dan sebagainya, artinya baik

buruknya pelayanan masyarakat pada proses pelayanan tersebut secara langsung yang mendapat aduan atau ketidakpuasan atas pelayanan publik adalah Kecamatan, untuk itu perlu bersinergi dengan instansi terkait, dan melakukan kiat - kiat serta strategi dalam peningkatan pelayanan, misalnya kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, upaya jemput bola dengan sosialisasi ke desa-desa, pemeliharaan perangkat komputer agar selalu siap untuk melaksanakan kegiatan pelayanan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	74	75	77	80	71,10	73,50	77	80	
		Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	85	87	89	90	88,86	89	89	90	

Berdasarkan data dari tabel dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan pada tahun 2024 adalah 89 dibandingkan dengan target kinerja sebesar 87 atau terdapat selisih lebih 2 dari target tahun 2024. Sedangkan Capaian kinerja indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2024 adalah 73,50 dari target kinerja sebesar 75 atau terdapat selisih lebih 1,50 dari target tahun 2024.

2.3 Prestasi yang dicapai pada tahun 2024

Prestasi merupakan hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan. Capaian yang diraih Kecamatan Brangsong pada Tahun 2024, yaitu:

1. Piagam Penghargaan atas Hasil Laporan Pengawasan Kersipan Internal Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal (terlampir).
2. Menjadi salah satu Unit Lokus Evaluasi (ULE) dalam pelaksanaan Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yg diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setda Kab Kendal dengan nilai indeks 4,29 atau dengan predikat A- untuk layanan administrasi (terlampir).

2.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Brangsong tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Brangsong, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Brangsong sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Brangsong terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Brangsong sampai dengan tahun 2024 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Rencana Kerja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak.
3. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.
4. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan.
5. Disiplin aparatur yang belum optimal
6. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.

7. Pelimpahan wewenang yang hanya sebagian kecil mengingat kecamatan merupakan suatu wilayah.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat didalam menerima program-program Pemerintah . Kecamatan Brangsong adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya ruang laktasi, sarana untuk disabilitas dan posko pengaduan, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD. Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Brangsong terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas.

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.

3. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional, seperti SPM dan isu strategis saat ini antara lain:

- Belum optimalnya pemerataan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah pendukung perekonomian;
- Belum optimalnya ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
- Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis pada industri, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif;

- Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka;
- Masih terdapatnya kesenjangan dan ketimpangan wilayah;
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal, berkarakter dan berdaya saing;
- Peningkatan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang handal, reformasi birokrasi, smart city dan inovasi daerah.

Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program nasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu mengawasi perkembangannya.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD Kecamatan Brangsong adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.
- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan

5. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Perangkat Daerah
- Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan Bekerja sama dengan tenaga ahli dalam mengelola sumberdaya yang ada
- Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Brangsong

No	Rancangan Awal RKPD (materi RKPD Tahun 2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2026)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Kecamatan Brangsong	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100%	1.969.021.413	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Kecamatan Brangsong	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100%	6.511.897.500	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Brangsong	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	90%	1.200.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Brangsong	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	90%	1.800.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Kecamatan Brangsong	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	60%	18.000.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Kecamatan Brangsong	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	60%	26.500.000	

4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Brangsong	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	87%	8.000.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Brangsong	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	87%	70.600.000	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Brangsong	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani	85%	15.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Brangsong	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani	85%	15.000.000	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Brangsong	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	5.200.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Brangsong	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	5.800.000	
					2.016.421.413					6.631.579.500	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa dan Kecamatan, tidak terdapat usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat kepada Kecamatan dikarenakan sifat pemerintah Kecamatan yang hanya menjadi penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Disamping itu Kecamatan juga bukan OPD yang memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan fisik.

Usulan Program/kegiatan dari masyarakat pada umumnya tercantum dalam kegiatan Musrenbangcam, yaitu kegiatan untuk kepentingan umum, serta sarana prasarana pelayanan lainnya. Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab agar dapat dimasukkan dalam RKPD Kabupaten Kendal dan Renja OPD Dinas/Instansi terkait yang membidangi urusan sesuai usulan tersebut.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kendal

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<i>N I H I L</i>			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

- **Arah Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Penyusunan rencana pembangunan daerah disusun untuk mendukung pencapaian Kebijakan Nasional. Maka dalam penyusunannya tidak lepas dari prioritas pembangunan Nasional. Prioritas Nasional Tahun 2026 yang terdapat dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

- **Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026**

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah juga tidak lepas dari prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar berkarakter dan adaptif serta inklusif dan merata;
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif.

- **Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2026**

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 adalah “**Sustainable Kendal**” dengan prioritas pada “**Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan**”. Arah kebijakan ini difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya rasa aman yang dapat menjadikan masyarakat untuk bebas beraktivitas, serta terwujudnya toleransi antar umat beragama dan kesetaraan gender.

Selain itu, arah kebijakan Pembangunan juga memperhatikan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 dengan prioritas pada

“Penguatan Kendal Berkarakter” di periode pertama RPJPD (2025-2029). Arah kebijakan ini diprioritaskan pada:

1. Penguatan hilirisasi dan modernisasi sektor perekonomian, pemerataan pembangunan wilayah, penguatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang difokuskan pada pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pusat pariwisata
2. Penguatan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan budaya literasi masyarakat, pengendalian laju penduduk, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan kualitas keluarga serta pemajuan budaya.
3. Penguatan penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pencari kerja, ketercukupan pangan dan penguatan pembangunan desa
4. Penguatan reformasi birokrasi, riset dan inovasi daerah.
5. Penguatan kualitas lingkungan hidup

Di samping program prioritas di atas, Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat *mainstreaming* yaitu pembangunan gender, *stunting* dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja, tetapi dilaksanakan oleh hampir semua Perangkat Daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing-masing Perangkat Daerah dengan tidak mengubah struktur anggaran.

Isu *stunting* juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan *stunting*. Penyebab terjadinya *stunting* dari ekonomi, social dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari Dana Desa.

Isu kemiskinan diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelesaian kemiskinan, akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah. Isu kemiskinan

termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan ekstrem yang sesuai dengan arahan Presiden, ditargetkan menuju 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2026 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta disinkronkan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Kecamatan Brangsong tahun 2026 apabila disandingkan dengan kebijakan Pusat dan Provinsi diuraikan pada Tabel 3.1, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2026

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Kendal	Program/kegiatan dalam Renja 2026
✓Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia; ✓Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru; ✓Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	✓Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; ✓Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar berkarakter dan adaptif serta inklusif dan merata; ✓Penguatan	✓ Penguatan hilirisasi dan modernisasi sektor perekonomian, pemerataan pembangunan wilayah, penguatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang difokuskan pada pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pusat pariwisata ✓ Penguatan peningkatan kualitas dan pemerataan	✓Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatn/Kota ✓Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ✓Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ✓Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ✓Program Pembinaan dan Pengawasan

mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif; ✓Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi, Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millenial dan Generasi Z), dan penyandang Disabilitas; ✓Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di Dalam Negeri; ✓Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; ✓Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; dan ✓Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan	ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; ✓Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif	pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan budaya literasi masyarakat, pengendalian laju penduduk, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan kualitas keluarga serta pemajuan budaya. ✓ Penguatan penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pencari kerja, ketercukupan pangan dan penguatan pembangunan desa ✓ Penguatan reformasi birokrasi, riset dan inovasi daerah. ✓ Penguatan kualitas lingkungan hidup	Pemerintahan Desa ✓Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
---	---	--	---

budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.			
---	--	--	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Brangsong

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Tahun 2026 pada prinsipnya merupakan bagian dari tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Brangsong tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Memaksimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif

Dengan Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

- 2) Meningkatkan kualitas mental dan kepribadian masyarakat yang beriman dan bertakwa.

Dengan sasaran: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;

- 3) Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Dengan sasaran: Meningkatnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan melalui pemberdayaan Karang Taruna dan PKK;

- 4) Meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, rasa ketentraman dalam masyarakat, dan solidaritas dan toleransi inter dan antar umat beragama.

Dengan sasaran: Terwujudnya kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah yang mantap serta kondusif;

- 5) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan prima dan kinerja pemerintah kecamatan yang responsif, professional dan akuntabel.

dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
- b. Terpenuhinya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kecamatan;
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Meningkatnya kemampuan, disiplin serta kesejahteraan aparatur pemerintahan kecamatan dan desa

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Brangsong
Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja PD	Nilai IKM	skor	90
			Nilai SAKIP	skor	73,60
		Meningkatnya pembangunan desa/kelurahan	Jumlah Desa yang Naik Statusnya	Desa	-

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan awal RKPD menjadi acuan tahunan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra PD menjadi pedoman jangka menengah lima tahunan dalam menjabarkan tujuan dan sasaran dalam program/kegiatan yang selaras dengan rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru demi

tercapainya sasaran pada Renstra PD. Usulan program serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja PD dengan mengakomodir aspirasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD sehingga kebutuhan pendanaan dapat diselaraskan.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kendal

Nama PD : Kecamatan Brangsong

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikati	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.960.525.836				3.747.973.500
7	01				KECAMATAN				2.960.525.836				3.747.973.500
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	Kec. Brangsong	100 persen	2.897.725.836	DAU & PAD		100 persen	3.590.973.500
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	Kec. Brangsong	100 persen	2.100.000	PAD		100 persen	4.000.000

7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Kec. Brangsong	4 Dokumen	2.100.000	PAD		4 Dokumen	4.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Keuangan PD	Kec. Brangsong	100 persen	2.540.605.836	DAU & PAD		100 persen	2.798.973.500
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Brangsong	26 orang/ bulan	2.540.605.836	DAU & PAD		28 orang/ bulan	2.798.973.500
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian PD	Kec. Brangsong	100 Persen	0	PAD		100 Persen	25.000.000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Brangsong	-	0	PAD		30 paket	25.000.000
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor	Kec. Brangsong	100 Persen	129.050.000	PAD		100 Persen	259.500.000
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Brangsong	12 Paket	3.421.000	PAD		12 Paket	6.000.000
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Brangsong	12 Paket	15.906.000	PAD		12 Paket	25.000.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Brangsong	12 Paket	7.507.600	PAD		12 Paket	11.000.000

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Brangsong	12 Paket	7.047.000	PAD		12 Paket	11.000.000
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Kec. Brangsong	12 Paket	8.912.000	PAD		12 Paket	9.500.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Brangsong	12 Laporan	86.256.400	PAD		12 Laporan	197.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Kec. Brangsong	12 Unit	49.500.000	PAD		13 Unit	68.000.000
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Brangsong	10 Unit	12.500.000	PAD		10 Unit	17.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Brangsong	2 Unit	37.000.000	PAD		3 Unit	45.000.000
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Brangsong	-	0	PAD		1 Unit	6.000.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan	Kec. Brangsong	100 Persen	142.100.000	PAD		100 Persen	144.500.000

7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Brangsong	12 Laporan	3.500.000	PAD		12 Laporan	4.000.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Brangsong	12 Laporan	75.000.000	PAD		12 Laporan	75.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Brangsong	12 Laporan	63.600.000	PAD		12 Laporan	65.500.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Kec. Brangsong	100 Persen	34.370.000	PAD		100 Persen	291.000.000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Brangsong	14 Unit	20.400.000	PAD		14 Unit	19.500.000
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kec. Brangsong	-	0	PAD		6 Unit	6.000.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Brangsong	10 Unit	7.870.000			14 Unit	12.000.000

7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Brangsong	-	0			1 unit	250.000.000
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Brangsong	10 Unit	6.100.000			10 Unit	3.500.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	Kec. Brangsong	100 Persen	1.800.000	PAD		100 Persen	7.500.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelimpahan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan.	Kec. Brangsong	100 Persen	1.800.000	PAD		100 Persen	7.500.000
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Brangsong	1 Dokumen	1.800.000	PAD		1 Dokumen	7.500.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kelembagaan kemasyarakatan yg dibina	Kec. Brangsong	100 Persen	8.150.000	PAD		100 Persen	28.000.000

7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Brangsong	12 Desa	8.150.000	PAD		12 Desa	28.000.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Brangsong	12 Lembaga Kemasyarakatan	200.000	PAD		12 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Brangsong	1 Dokumen	6.000.000	PAD		1 Dokumen	7.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Brangsong	12 Laporan	1.950.000	PAD		12 Laporan	15.000.000

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Kec. Brangsong	100 Persen	35.400.000	PAD		100 Persen	72.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Brangsong	12 Desa	3.600.000	PAD		12 Desa	8.500.000
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Brangsong	1 Laporan	3.600.000	PAD		1 Laporan	8.500.000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Brangsong	12 laporan	31.800.000	PAD		12 laporan	63.500.000
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Brangsong	12 Laporan	31.800.000	PAD		12 Laporan	63.500.000

						dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	prosentasi kasus konflik sosial yang di tangani	Kec. Brangsong	100 Persen	15.200.000	PAD		100 Persen	25.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kec. Brangsong	1 Kegiatan	15.200.000	PAD		1 Kegiatan	25.000.000
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Brangsong	55 Orang	15.200.000	PAD		55 Orang	25.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	Kec. Brangsong	100 Persen	2.250.000	PAD		100 Persen	24.500.000

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintah desa	Kec. Brangsong	12 Desa	2.250.000	PAD		12 Desa	24.500.000
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Brangsong	12 Dokumen	150.000	PAD		12 Dokumen	5.000.000
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Brangsong	12 Dokumen	1.800.000	PAD		12 Dokumen	7.500.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Brangsong	12 Dokumen	300.000	PAD		12 Dokumen	12.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan yang berisikan rencana pembangunan tahunan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Prioritas Program dalam Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Tahun 2026 terdiri dari 6 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 2.897.725.836,- Rencana Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 2.100.000,-

- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 2.540.605.836,-
- c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 3.421.000,-
- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 15.906.000,-
- e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan rencana alokasi Rp. 7.507.600,-
- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 7.047.000,-
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 8.912.000,-
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 86.256.400,-
- i. Pengadaan Mebel, dengan alokasi sebesar Rp. 12.500.000,-
- j. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 37.000.000.-
- k. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 3.500.000.-
- l. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000.-
- m. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 63.600.000.-
- n. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 20.400.000,-
- o. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.870.000,-
- p. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.100.000,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerinatahan dan Pelayanan Publik, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000,-. Rencana program tersebut dijabarkan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha , dengan alokasi rencana anggaran sebesar Rp. 1.800.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan , dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 8.150.000,-
Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000,-
 - b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-
 - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 1.950.000.-
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 35.400.000,-
Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sinergitas dengan, dengan rencana alokasi anggaran sebe
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.600.000,-
 - b. Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.800.000.-

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 15.200.000,- Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 15.200.000,-
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp.2.250.000,- Program tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebesar Rp 150.000,-
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 1.800.000,-
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan rencana alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000,-

4.2. Pendanaan

Pada prinsipnya bahwa semua perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan Brangsong baik menyangkut Rencana Kinerja maupun Rencana Anggaran pada Tahun 2026 ini dilaksanakan secara partisipatif dengan meminta masukan dan saran dari masing-masing Seksi dan Sekretariat untuk dirumuskan bersama berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Brangsong, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Brangsong dan diajukan untuk disahkan oleh Bupati Kendal.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Brangsong Tahun Anggaran 2026, di danaai dengan

anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-OPD) Kecamatan Brangsong Tahun Anggaran 2026.

TABEL 4.1 RENCANA KERJA RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BRANGSONG						2.960.525.836,00							3.747.973.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.960.525.836,00							3.747.973.500,00	
	7.01	KECAMATAN						2.960.525.836,00							3.747.973.500,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.897.725.836,00						-	3.590.973.500,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.100.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		4.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.540.605.836,00			-	Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-	-	2.798.973.500,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				30 Orang/bulan	2.540.605.836,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		2.798.973.500,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		25.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	129.050.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-	-	259.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.421.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		6.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.906.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		25.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	7.507.600,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		11.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.047.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		11.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8.912.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		9.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	86.256.400,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		197.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	49.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-	-	68.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	12.500.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		17.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	37.000.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		45.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		6.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	142.100.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-	-	144.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.500.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		4.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		75.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	63.600.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		65.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	34.370.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-	-	291.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	20.400.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		19.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		6.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	7.870.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		12.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		250.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	6.100.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		3.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1.800.000,00						-	7.500.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	1.800.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-	-	7.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		7.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.150.000,00						-	28.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	8.150.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-	-	28.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarak atan	200.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		6.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n kemandiri an desa dan pemer ataan pemb angunan desa	-		7.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	1.950.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n kemandiri an desa dan pemer ataan pemb angunan desa	-		15.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						35.400.000,00						-	72.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	3.600.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-	-	8.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3.600.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		8.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	31.800.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-	-	63.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	31.800.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		63.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						15.200.000,00						-	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	15.200.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	15.200.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		25.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						2.250.000,00						-	24.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	2.250.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-	-	24.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	150.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		5.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		7.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	300.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif Peningkata n tata kelola pem erintahan, reformasi birokrasi dan pening katan kualitas pelayanan publik serta peningkata n riset dan teknologi	-		12.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	J U M L A H							2.960.525.836,00							3.747.973.500,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabuapten Kendal Tahun 2021–2026 serta memperhatikan Rencana Strategis Kecamatan Brangsong Tahun 2021–2026.

Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan Kecamatan Brangsong. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Brangsong pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Brangsong ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Brangsong Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Brangsong;
3. Penyusunan Renja Kecamatan Brangsong ini juga berpedoman pada RKPD Brangsong Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung

jawab seluruh pegawai Kecamatan Brangsong, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Kendal.

Dengan disusunnya Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Brangsong pada Tahun Anggaran 2026.

Brangsong, November 2025
CAMAT BRANGSONG



YUNAN ARIEF RAKHMAN, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19730629 200501 1 003



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.2/ 7 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 77 Seri D No. 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026;
 - b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026 dalam pelaksanaan, pengendalian, dan *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026.
2. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemerintahan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang ketenteraman dan ketertiban dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026.

6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026.
7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum bertugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi bidang pelayanan umum dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026.
8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 100.3.3.2/7/2025

TANGGAL : 8 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Brangsong	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Brangsong	Sekretaris	
3.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan	
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Brangsong	Anggota	
5.	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	1. Agni Nurmala Vita, A.Md; 2. Hary Santoso; 3. Muchyidin, A.Md.Kom; dan 4. Mulyadi; dan 5. Solichatun Nafiah.
6.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan	
7.	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	Nur Patoni
8.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketenteraman dan Ketertiban	
9.	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	Bayu Pamungkas
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	Dwi Rivaldi
12.	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum	
13.	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	M. Abdul Rahman Wahid.

